

PENERAPAN KRITERIA REESI SEBAGAI ASSESSMENT TOOLS MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA

IMPLEMENTATION OF REESI CRITERIA ASSESSMENT TOOLS IN MONITORING AND EVALUATING THE DEVELOPMENT PLANNING IN INDONESIA

Taufik Hidayat

Sekolah Pasca-sarjana Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi Publik. Universitas Brawijaya.
E-mail: taufikumsu@yahoo.com

Abstrak : Untuk memastikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Penerapan kriteria REESI sebagai *assessment tools* dalam melakukan monitoring dan evaluasi diharapkan dapat lebih menjamin keberhasilan perencanaan dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. REESI adalah singkatan dari Relevansi, Efektifitas, Efisiensi, Sustainable dan Impact. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan melalui pendekatan deskriptif eksploratif. Secara keseluruhan penilaian monitoring dan evaluasi menggunakan kriteria REESI sebagai *assessment tools* dapat dilihat dalam tabel berikut:

Kata kunci: efektivitas, efisiensi, evaluasi, impact, monitoring, perencanaan pembangunan daerah, sustainable, relevansi,

Abstract : *To ensure the implementation of regional development planning in accordance with the objectives and targets that have been determined it was important to conduct monitoring and evaluation activities. The application of REESI criteria as assessment tools in monitoring and evaluation was expected to better ensure the success of planning in every activity to be implemented. REESI stood for Relevance, Effectiveness, Efficiency, Sustainable and Impact. The method used in this research was qualitative research method. Qualitative method used in term of explorative descriptive approach. Throughout the assessment of monitoring and evaluation using REESI criteria as assessment tools could be seen in the following table:*

Keywords: effectiveness, efficiency, evaluation, impact, monitoring, regional planning, relevance, sustainable.

PENDAHULUAN

Perencanaan adalah keseluruhan proses untuk menentukan tujuan yang akan dicapai dengan memilih tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai, dimana tindakan-tindakan tersebut didukung oleh keseluruhan sumber daya yang ada. Perencanaan adalah suatu fungsi manajemen yang merupakan kegiatan strategis dan perlu dilakukan sebelum pelaksanaan pencapaian tujuan mulai

dilaksanakan, karena tanpa membuat perencanaan maka kegiatan yang dilakukan tidak akan terarah sebab tidak ada pegangan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang kita (baca= individu dan/atau organisasi) laksanakan.

Perencanaan adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan suatu proses dalam pengambilan suatu keputusan manajemen untuk memperkirakan (mengasumsikan, memprediksikan tindakan-tindakan) kebutuhan organisasi

yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.

Sebagaimana yang diutarakan George Robert Terry, salah seorang tokoh manajemen yang berperan dalam memberikan teori-teori manajemen, dalam bukunya *Principle Of Management* pada tahun 1977, memberikan definisi : *Planning is selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation of proposed activities believed necessary to achieve desired results* [Perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu].

Dalam suatu kegiatan kita akan dihadapkan pada berbagai keterbatasan sumber daya seperti tenaga, biaya, waktu, peralatan, kemampuan dan lain-lain. Oleh karena itu apabila kegiatan tanpa didahului oleh perencanaan yang matang maka akan terjadi kesimpangsiuran, pemborosan yang mengakibatkan tidak berjalannya kegiatan. Demikian halnya, dengan perencanaan pembangunan daerah (PPD).

Untuk memastikan pelaksanaan PPD sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Penerapan kriteria R.E.E.S.I sebagai *assessment tools* dalam melakukan monitoring dan evaluasi diharapkan dapat lebih menjamin keberhasilan perencanaan dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. R.E.E.S.I adalah singkatan dari Relevansi, Efektifitas, Efisiensi, Sustainable dan Impact. Kriteria ini akan diuraikan lebih lanjut.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan melalui pendekatan deskriptif eksploratif. Pendekatan deskriptif eksploratif dilakukan dengan cara studi dokumen. Studi dokumen dilakukan untuk mencari informasi tertulis tentang PPD, Monitoring, dan Evaluasi. Studi dokumen dilakukan pada institusi yang terkait dengan perencanaan program-program pembangunan daerah. Setelah diperoleh data akan dianalisis secara deskriptif eksploratif.

TINJAUAN TEORI

a. Relevansi, Efektifitas, Efisiensi, Sustainable dan Impact

a.1. Relevansi

Secara umum, arti dari relevansi adalah kecocokan. Relevan adalah bersangkutan paut, berguna secara langsung (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Relevansi berarti kaitan, hubungan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menurut Green (1995: 16), relevansi ialah sesuatu sifat yang terdapat pada dokumen yang dapat membantu pengarang dalam memecahkan kebutuhan akan informasi. Dokumen dinilai relevan bila dokumen tersebut mempunyai topik yang sama, atau berhubungan dengan subjek yang diteliti (*topical relevance*). Pada berbagai tulisan mengenai *relevance*, *topicality* (topik) merupakan faktor utama dalam penilaian kesesuaian dokumen.

Perencanaan harus memastikan tujuan yang dicapai bersangkutan paut dan berhubungan erat dengan kebutuhan *stakeholder* yang akan di layani dalam setiap kegiatan. *Stakeholder* disini memberi pengertian bahwa kebutuhan setiap pihak (individu/institusi) yang mempunyai kepentingan atas pelaksanaan kegiatan dalam perencanaan harus diperhatikan. Untuk itu, dalam melakukan perencanaan kita harus melakukan keseluruhan analisa yang menyangkut pihak-pihak yang berkepentingan, dikenal dengan istilah *stakeholder analysis*.

Dalam penentuan tujuan yang akan dicapai, kita harus mendasarkannya kepada tujuan-tujuan yang juga akan dicapai oleh pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang akan dilakukan. Pemangku kepentingan adalah terjemahan dari kata *stakeholder* dapat diartikan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat. Misalnya bilamana isu perikanan, maka stakeholder dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan isu perikanan, seperti nelayan, masyarakat pesisir, pemilik kapal, anak buah kapal, pedagang ikan, pengolah ikan, pembudidaya ikan, pemerintah, pihak swasta di bidang perikanan, dan sebagainya. Stakeholder dalam hal ini dapat juga dinamakan pemangku kepentingan.

Istilah *stakeholder* sudah sangat populer. Kata ini telah dipakai oleh banyak pihak dan hubungannya dengan berbagai ilmu atau konteks, misalnya manajemen bisnis, ilmu komunikasi, pengelolaan sumberdaya alam, sosiologi, dan lain-lain. Lembaga-lembaga publik telah menggunakan istilah stakeholder ini secara luas ke dalam proses-proses pengambilan dan implementasi keputusan. Secara sederhana, *stakeholder* sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu atau suatu rencana.

Dalam buku *Cultivating Peace*, Ramizes mengidentifikasi berbagai pendapat mengenai *stakeholder* ini. Beberapa definisi yang penting dikemukakan seperti Freeman (1984) yang mendefinisikan *stakeholder* sebagai kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan Biset (1998) secara singkat mendefinisikan *stakeholder* merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Stakeholder ini sering diidentifikasi dengan suatu dasar tertentu sebagaimana dikemukakan Freeman (1984),

yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relatif *stakeholder* terhadap isu, Grumble and Wellard (1996), dari segi posisi penting dan pengaruh yang dimiliki mereka.

Pandangan-pandangan di atas menunjukkan bahwa pengenalan *stakeholder* tidak sekedar menjawab pertanyaan siapa *stakeholder* suatu isu tapi juga sifat hubungan *stakeholder* dengan isu, sikap, pandangan, dan pengaruh *stakeholder* itu. Aspek-aspek ini sangat penting dianalisis untuk mengenal *stakeholder*.

Berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh *stakeholder* terhadap suatu isu *stakeholder* dapat dikategorikan kedalam beberapa kelompok ODA (1995) mengelompokkan *stakeholder* sebagai *stakeholder* primer, *stakeholder* sekunder dan *stakeholder* kunci. Sebagai gambaran pengelompokan tersebut pada berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah (publik) dapat dikemukakan kelompok *stakeholder*.

Stakeholder utama merupakan *stakeholder* yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan kegiatan. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan.

1. Masyarakat dan tokoh masyarakat : Masyarakat yang terkait dengan kegiatan, yakni masyarakat yang diidentifikasi akan memperoleh manfaat dan yang akan terkena dampak (kehilangan tanah dan kemungkinan kehilangan mata pencaharian) dari kegiatan ini. Tokoh masyarakat : Anggota masyarakat yang oleh masyarakat ditokohkan di wilayah itu sekaligus dianggap dapat mewakili aspirasi masyarakat
2. Pihak Manajer publik : lembaga/badan publik yang bertanggung jawab dalam

pengambilan dan implementasi suatu keputusan.

Stakeholder pendukung (sekunder) adalah *stakeholder* yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan kegiatan, tetapi memiliki kepedulian (*concern*) dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah.

1. Lembaga (Aparat) pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki tanggung jawab langsung.
2. Lembaga pemerintah yang terkait dengan isu tetapi tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam pengambilan keputusan.
3. Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) setempat : LSM yang bergerak di bidang yang bersesuaian dengan rencana, manfaat, dampak yang muncul yang memiliki "concern" (termasuk organisasi massa yang terkait).
4. Perguruan Tinggi: Kelompok akademisi ini memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan pemerintah.
5. Pengusaha (Badan usaha) yang terkait.

Stakeholder kunci merupakan *stakeholder* yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. *Stakeholder* kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif, dan instansi. Misalnya, *stakeholder* kunci untuk suatu keputusan untuk suatu kegiatan level daerah kabupaten.

Untuk menjamin keberlangsungan serta kesuksesan suatu perencanaan maka prinsip relevansi, dimana setiap perencanaan harus terkait erat dan berhubungan dengan tujuan-tujuan para

pihak yang berkepentingan, sangat mutlak diperlukan.

a.2. Efektifitas

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan efektif adalah : 1. 1 ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); 2 manjur atau mujarab (tt obat); 3 dapat membawa hasil; berhasil guna (tt usaha, tindakan); mangkus; 4 mulai berlaku (tt undang-undang, peraturan).

Efektivitas merupakan suatu istilah yang berasal dari kata "*efektif*". Tim Prima Pena (2001 : 155), mengemukakan bahwa *effective* adalah berhasil, manjur, tepat. *Effectiveness* (efektivnes) : keefektifan, kemanjuran; ketepatan.

Pengertian seperti tersebut sejalan dengan rumusan yang dikemukakan oleh The Liang Gie ((2001 :: 108) yaitu : *Efectiveness–Efektivitas: Suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya.*

Ulum (2008 :199) mengemukakan bahwa pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wesely).

Selanjutnya Ulum (2008) menegaskan bahwa hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Djumhana (2007 : 53) antara lain menjelaskan bahwa Efektivitas yaitu : *menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.*

Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcomes dengan output.

Rumusan dan pandangan tentang "efektivitas" yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa untuk mengetahui sesuatu mencapai efektivitas atau tidak, harus dikaitkan antara rencana, kehendak, aturan, tujuan atau sasaran dengan hasil yang telah dicapai setelah melakukan kegiatan untuk mencapai maksud, sasaran atau apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Pengertian efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa : Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

Adapun pengertian efektifitas menurut Prasetyo Budi Saksono (1984) adalah : Efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input “.

Dari pengertian-pengertian efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Dengan kata lain bahwa suatu hasil dikatakan mencapai efektivitas jika hasil tersebut benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk ketentuan yang berlaku. Disamping itu, uraian yang dikemukakan di atas, menunjukkan pula bahwa indikator atau ukuran efektivitas adalah kesesuaian antara rencana dengan hasil yang dicapai, atau antara ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan pelaksanaannya, atau dengan kata lain

bahwa efektif adalah kesamaan antara rencana dan hasil yang dicapai. Kesamaan atau kesesuaian dimaksud mencakup faktor waktu, prosedur dan sebagainya, sehingga oleh karenanya, maka untuk mengetahui sesuatu kegiatan mencapai efektivitas, dalam proses perencanaannya perlu menetapkan secara jelas dan tegas tingkat keberhasilan yang diharapkan.

a.3. Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan dengan hasilnya. Menurut definisi ini, efisiensi terdiri atas 2 (dua) unsur yaitu kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Pengertian efisiensi menurut Mulyamah (1987;3) yaitu: Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya.

S.P.Hasibuan (1984;233-4) yang mengutip pernyataan H. Emerson: Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output efisiensi adalah sesuatu yang kita kerjakan berkaitan dengan menghasilkan hasil yang optimal dengan tidak membuang banyak waktu dalam proses pengerjaannya. Efektif belum tentu efisien dan begitu sebaliknya.

Efisiensi dalam ilmu ekonomi digunakan untuk merujuk pada sejumlah konsep yang terkait pada kegunaan pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya. Sebuah sistem ekonomi dapat disebut efisien bila memenuhi kriteria berikut : Tidak ada yang bisa dibuat menjadi lebih makmur tanpa adanya pengorbanan. Tidak ada keluaran yang dapat diperoleh tanpa adanya peningkatan jumlah masukan. Tidak ada produksi bila tanpa adanya biaya yang rendah dalam satuan unit.

Definisi tersebut tidak akan selalu sama akan tetapi pada umumnya akan

mencakup semua ide yang hanya dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Sebuah sistem ekonomi yang efisien dapat memberi lebih banyak barang dan jasa bagi masyarakat tanpa menggunakan lebih banyak sumber daya.

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Jadi sesuai dengan pernyataan di atas bahwa konsep efisiensi akan tercipta jika keluaran yang diinginkan dapat dihasilkan secara optimal dengan hanya masukan yang relative tetap, atau jika masukan yang sekecil mungkin dapat menghasilkan keluaran yang optimal.

Konsep efisiensi sendiri terdiri dari efisiensi teknologi dan efisiensi ekonomis. Efisiensi teknologi diterapkan dalam pencapaian kuantitas keluaran secara fisik sesuai dengan ukuran hasil yang sudah ditetapkan. Sementara efisiensi ekonomis tercipta jika ukuran nilai kepuasan atau harga sudah diterapkan terhadap keluaran.

Konsep efisiensi selalu dikaitkan dengan efektivitas. Efektivitas merupakan bagian dari konsep efisiensi karena tingkat efektivitas berkaitan erat dengan pencapaian tujuan relative terhadap harganya. Apabila dikaitkan dengan dunia pendidikan, maka suatu program pendidikan yang efisien cenderung ditandai dengan pola penyebaran dan pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang sudah ditata secara efisien. Program pendidikan yang efisien adalah program yang mampu menciptakan keseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan akan sumber-sumber pendidikan sehingga upaya pencapaian tujuan tidak mengalami hambatan.

Tujuan dari efisiensi itu sendiri adalah : 1) Dapat meningkatkan tercipta keluaran yang diinginkan dapat dihasilkan secara optimal dengan hanya masukan yang relative tetap, atau jika masukan yang sekecil mungkin dapat menghasilkan

keluaran yang optimal
2) Dengan meningkatkan efisiensi maka keseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan akan sumber-sumber terjaga sehingga upaya pencapaian tujuan tidak mengalami hambatan.

Disebabkan sumber daya yang terbatas, perencanaan harus seoptimal mungkin membuat suatu kegiatan dapat mencapai tujuan dengan penggunaan seminimal mungkin sumber daya.

a.4. Sustainable

Berdasarkan tata bahasa, pengertian kata *sustainable* pada dasarnya dapat diartikan juga dengan *capable of being sustained* atau kemampuan untuk tetap berkelanjutan. Tujuan yang hendak dicapai dalam suatu perencanaan harus dapat berlangsung terus-menerus serta berkesinambungan antara tujuan perencanaan yang satu dengan perencanaan selanjutnya.

Untuk suatu proses dikatakan berkelanjutan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Cara berpikir yang integratif. Dalam konteks ini, haruslah melihat keterkaitan fungsional dari kompleksitas antara sistem alam, sistem sosial dan manusia di dalam merencanakan, mengorganisasikan maupun melaksanakan kegiatan tersebut.
2. Harus dilihat dalam perspektif jangka panjang. Hingga saat ini yang banyak mendominasi pemikiran para pengambil keputusan dalam kegiatan adalah kerangka pikir jangka pendek, yang ingin cepat mendapatkan hasil dari proses kegiatan yang dilaksanakan. Kondisi ini sering kali membuat keputusan yang tidak memperhitungkan akibat dan implikasi pada jangka panjang, seperti misalnya potensi kerusakan hutan yang telah mencapai 3,5 juta Ha/tahun, banjir yang semakin sering melanda dan dampaknya yang semakin luas, krisis

energi (karena saat ini kita telah menjadi *nett* importir minyak tanpa pernah melakukan langkah diversifikasi yang maksimal ketika masih dalam kondisi surplus energi), moda transportasi yang tidak berkembang, kemiskinan yang sulit untuk diturunkan, dan seterusnya.

3. Mempertimbangkan keanekaragaman hayati, untuk memastikan bahwa sumberdaya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa mendatang. Yang tak kalah pentingnya adalah juga pengakuan dan perawatan keanekaragaman budaya yang akan mendorong perlakuan yang merata terhadap berbagai tradisi masyarakat sehingga dapat lebih dimengerti oleh masyarakat.

4. Distribusi keadilan sosial ekonomi. Dalam konteks ini dapat dikatakan pembangunan berkelanjutan menjamin adanya pemerataan dan keadilan sosial yang ditandai dengan meratanya sumber daya lahan dan faktor produksi yang lain, lebih meratanya akses peran dan kesempatan kepada setiap warga masyarakat, serta lebih adilnya distribusi kesejahteraan melalui pemerataan ekonomi.

Untuk meningkatkan kualitas keberlanjutan perencanaan Budihardjo (2005), mengusulkan:

1. Orientasi jangka panjang yang ideal perlu disenyawakan dengan pemecahan masalah jangka pendek yang bersifat *inkremental*, dengan wawasan pada pelaksanaan atau *action oriented plan*.
2. Penegakan mekanisme *development control* lengkap dengan sanksi (disinsentif) bagi berbagai jenis pelanggaran dan insentif untuk ketaatan pada peraturan.
3. Penataan ruang secara total, menyeluruh dan terpadu dengan

model-model *advocacy*, *participatory planning* dan *over-the-board planning* atau perencanaan lintas sektoral, sudah saatnya dilakukan secara konsekuendan konsisten.

4. Perlu peningkatan kepekaan sosio kultural dari para penentu kebijakan dan para professional melalui berbagai forum

pertemuan/diskusi/ceramah/publikasi, baik secara formal maupun informal.

5. Perlu adanya perhatian yang lebih terhadap kekayaan khasanah lingkungan alam dalam memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien.

6. Keunikan setempat dan kearifan lokal perlu diserap sebagai landasan dalam merencanakan

Untuk keberlangsungan suatu kegiatan, dalam perencanaan juga harus ditegaskan pihak-pihak yang harus mengelola, bagaimana tata cara pengelolaannya serta dari biaya mana pengelelolaan tersebut dilakukan.

a.5. Impact

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan dampak sebagai “pengaruh kuat yg mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif)”. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dengan kata lain Dampak adalah sesuatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, dapat bersifat positif atau negatif. Perencanaan harus memperkirakan situasi lingkungan eksternal masa depan yang akan dihadapi. Tujuannya adalah untuk mengenali dan mempertimbangkan dampak dari kecenderungan perkembangan faktor-faktor dalam ekonomi makro, bidang industri atau jasa, politik, perubahan sosial,

teknologi, budaya dan gaya hidup masyarakat, keamanan dan lain sebagainya, apakah positif ataukah negatif. Juga diperkirakan situasi persaingan. Dampak positif berarti peluang (*opportunities*) bagi pengembangan karya yang perlu ditangkap dan dimanfaatkan. Dampak negatif berarti ancaman (*threats*), hambatan atau kendala bagi kemajuan, maka perlu diatasi.

Impact (dampak) tidak hanya meninjau dari sisi ekonomi saja atau sosial saja, akan tetapi meninjau dari berbagai faktor yang memungkinkan seperti :ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan lain sebagainya. Impact (dampak) merupakan ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dinilai oleh pencapaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Dengan kata lain, Impact (dampak) adalah tolak ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro (sosial, ekonomi, lingkungan, atau kepentingan umum lainnya) yang ingin dicapai dari manfaat.

Impact (dampak) dapat berupa *positive impact* atau justru *negative impact*. Cakupan *impact* lebih luas daripada *benefit* dan *impact* dari suatu kegiatan dapat mencakup satu atau beberapa kondisi makro tertentu seperti bidang sosial, ekonomi, ataupun kepentingan umum yang lain. *Impact* ini tidak dapat diukur dalam waktu dekat dan hasil pengukurannya pun akan lebih baik jika dilakukan oleh pihak pengguna layanan.

b. Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan peran pemerintah daerah dalam era otonomi luas, perencanaan pembangunan daerah diperlukan karena pelaksanaan pembangunan didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sebelum menjelaskan tentang perencanaan pembangunan daerah, perlu dipahami terlebih dahulu perencanaan

pembangunan. Riyadi dan Bratakusumah (2004:6) mengatakan perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (*action plan*).

Menurut Sjafrizal (2009:15), secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaklah bersifat implementif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan).

Kemudian M.L. Jhingan (1984:16) seorang ahli perencanaan pembangunan berkebangsaan India memberikan definisi yang lebih kongkrit mengenai Perencanaan Pembangunan tersebut, yaitu ; ”Perencanaan Pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula”.

Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset/ penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat, baik yang dilakukan secara konseptual/dokumentasi maupun eksperimental.

Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan diatas meja, tanpa melihat realita dilapangan. Data-data real lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area (wilayah) pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah (Riyadi dan Bratakusumah, 2004:7) dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada asas prioritas.

Berarti, Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) akan membentuk tiga hal pokok yang meliputi : perencanaan komunitas, menyangkut suatu area (daerah), dan sumber daya yang ada di dalamnya. Pentingnya orientasi menyeluruh dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dengan tingkat kompleksitas yang besar tidak mungkin kita mengabaikan masalah-masalah yang muncul sebagai tuntutan kebutuhan sosial yang tak terelakkan. Tetapi dipihak lain adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki tidak memungkinkan pula untuk melakukan proses pembangunan yang langsung menyentuh atau mengatasi seluruh permasalahan dan tuntutan secara sekaligus. Dalam hal inilah penentuan prioritas perlu dilakukan, yang dalam prakteknya dilakukan melalui proses perencanaan.

Melakukan perencanaan pembangunan daerah berbeda dengan melakukan perencanaan proyek atau perencanaan-perencanaan kegiatan yang bersifat lebih spesifik dan mikro. Proses perencanaan pembangunan daerah jauh lebih kompleks dan rumit, karena menyangkut perencanaan pembangunan bagi suatu wilayah dengan berbagai komunitas, lingkungan dan kondisi sosial yang ada didalamnya. Apalagi bila mencakup wilayah pembangunan yang luas, kultur sosialnya amat heterogen, dengan tingkat kepentingan yang berbeda. Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat diartikan bahwa ; perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sedangkan oleh Affandi Anwar dan Setia Hadi (1996: 24-28) mengatakan perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu proses atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan disuatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antara sumberdaya manusia dengan sumberdaya lain, termasuk sumberdaya alam dan lingkungan melalui investasi. Dikatakan wilayah tertentu karena memang implementasinya hanya dapat digunakan didaerah tertentu, dimana penelusuran lapangan dilakukan, sehingga tidak mungkin diimplementasikan didaerah lain secara utuh, kecuali untuk hal-hal tertentu saja yang memiliki kesamaan kondisi dan tuntutan kebutuhan yang hampir sama.

Jenssen dalam Riyadi dan Bratakusumah (2004:8) merekomendasikan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks tadi, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan

sumberdaya yang ada, baik sumberdaya manusia, sumber daya fisik, sumber daya alam, keuangan, serta sumber-sumber daya lainnya. Dalam konteks ini ia menyebutnya dengan istilah pembangunan endogen, atau dengan kata lain pembangunan yang berbasis potensi.

Selain itu, perencanaan yang mempertimbangkan kondisi spatial suatu daerah juga menjadi hal penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah akan mencakup suatu raung tertentu, sehingga diperlukan adanya penataan ruang yang efektif, dimana tata ruang akan mempengaruhi proses pembangunan beserta implikasinya.

Ciri-ciri pembangunan daerah sebagaimana menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004 : 9) meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Menghasilkan program-program yang bersifat umum.
2. Analisis perencanaan bersifat makro/luas.
3. Lebih efektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka menengah dan panjang.
4. Memerlukan pengetahuan secara interdisipliner, general dan universal, namun tetap memiliki spesifikasi masing-masing yang jelas.
5. Fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan jangka pendek (1 tahunan).

Dengan melihat berbagai pengertian mengenai perencanaan maupun perencanaan pembangunan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua perencanaan adalah merupakan perencanaan pembangunan. Suatu perencanaan disebut sebagai perencanaan pembangunan apabila dipenuhi berbagai ciri-ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan. Ciri suatu perencanaan pembangunan (*agent of development*) oleh karena perencanaan pembangunan sendiri merupakan bagian

dari administrasi pembangunan yang menjadi bagian kewenangan pemerintah.

Bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah memerlukan Koordinasi dari semua unsur yang terlibat dalam rangka menghasilkan sebuah program dan kegiatan yang holistik dan komprehensif, Selain itu Perencanaan Pembangunan Daerah harus mampu menentukan prioritas program dan kegiatan berdasarkan fakta dan data dari potensi daerahnya, serta harus mempunyai sumber daya yang mempunyai kemampuan yang baik secara interdisipliner, sehingga koordinasi sekali lagi sangat diperlukan dalam pembuatan sebuah perencanaan pembangunan yang terintegrasi, tersinkronisasi, dan menyeluruh.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah merupakan sistem yang dibentuk dari unsur-unsur perencanaan, pembangunan dan daerah yang meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut :

1. Lembaga Administrasi Negara (1999) dalam Riyadi dan Bratakusumah (2004:4) memberikan pengertian : perencanaan adalah suatu proses yang terus menerus yang melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa yang akan datang.
2. Ginanjar Kartasmita (1997) memberikan pengertian pembangunan adalah serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa menuju perubahan yang lebih baik.
3. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan defenisi daerah merupakan kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian dapat dikatakan, perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumberdaya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi tetap berpegang pada asas prioritas.

c. Monitoring dan Evaluasi

c.1. Monitoring

Monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program yang dibuat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan perencanaan dan indikator keluaran, adakah hambatan yang terjadi dan bagaimana para pelaksana program kerjasama mampu mengatasi hambatan tersebut. Monitoring terhadap kegiatan yang sedang berlangsung merupakan langkah pengendalian yang baik dalam penentuan keberhasilan pelaksanaan suatu program.

Secara lebih terperinci monitoring bertujuan untuk (Kementerian Dalam Negeri, 2012):

- Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan tentang kegiatan yang dilaksanakan;
- Mendapatkan gambaran tentang capaian program;

- Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan;
- Menyajikan fakta dan nilai yang perlu diperhatikan

c.2. Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan monitoring karena informasi yang dihasilkan dari kegiatan monitoring dijadikan dasar untuk menilai pelaksanaan kegiatan. Evaluasi diarahkan untuk mengukur capaian dan mengontrol arah pelaksanaan kegiatan (Kementerian Dalam Negeri, 2012).

Secara lebih terperinci evaluasi bertujuan untuk:

- Menilai keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan;
- Menentukan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program;
- Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan;
- Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program;
- Media untuk menentukan arah program dan pendekatan yang tepat untuk mencapai sasaran dengan baik.

d. Pengertian Penerapan

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil (Badudu & Zain, 1996:1487). Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang (Ali, 1995:1044).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan secara bersama-sama.

Adapun unsur-unsur penerapan meliputi (Solichin, 1990:45):

1. Adanya program yang dilaksanakan.

- Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Assesmet Tools pelaksanaan Money PPD, menggunakan pendekatan *Result Based Management*.

Assessment Tools dengan pendekatan *Result Based Management* merupakan strategi manajemen yang luas bertujuan untuk mencapai perubahan penting dalam cara instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah melakukan perencanaan serta melaksanakan perencanaan tersebut, dengan meningkatkan kinerja (mencapai hasil yang lebih baik) sebagai pusat orientasi.

Pendekatan yang berorientasi pada hasil, bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dengan mendefinisikan hasil yang diharapkan realistis, memantau kemajuan menuju pencapaian hasil yang diharapkan dari, mengintegrasikan pengalaman ke dalam keputusan manajemen dan pelaporan kinerja.

Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kesesuaian perencanaan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai sesuai tujuan utama program. Untuk dapat mengetahui capaian program dan menyusun tingkat keberhasilan pelaksanaan program perlu dibuat suatu *assessment tools* money sebagai alat ukur.

Assessment tools MONEV harus disusun sebagai langkah awal dalam pelaksanaan Money. Kegiatan money ditujukan untuk memperoleh fakta, data dan informasi tentang pelaksanaan kegiatan serta untuk melihat apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan indikator-indikator yang telah

direncanakan. Temuan dari hasil money akan menjadid asar untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan.

Berikut *assessment tools* yang dapat digunakan dalam pelaksanaan money PPD.

Criteria	Sub-criteria (see notes on definitions)	Evidence Required	Rating	Value Rating	Weight %	Adjusted Score
R E L E V A N C E	1. Is the proposed project consistent with stakeholders development priorities; national government priorities; beneficiary priorities	Highly Relevant - evidence is available that stakeholder analysis has been undertaken and stakeholders have actively participated and are agreed on project design	Highly relevant	3	15%	0.45
		Relevant - evidence is available that stakeholder analysis has been undertaken and most stakeholders have actively participated and agreed on project design	Relevant	2		0.3
		Partly Relevant - evidence is available that stakeholders have been identified and stakeholders have participated	Partly relevant	1		0.15
		Not Relevant - evidence is not available that stakeholder analysis has been undertaken and stakeholders have actively participated and are agreed on project design	Not relevant	0		0
A D E Q U A T E	2. Is the design of the proposed project based on an adequate analysis of the problems to be addressed, including consideration of constraints to achieving identified outcomes	Highly Relevant - evidence is available that a thorough problem analysis has been undertaken (i.e. there is a problem that needs to be addressed and a solution has been based on this)	Highly relevant	3	15%	0.45
		Relevant - evidence is available that a problem analysis has been undertaken and impact and outcomes have been based on this	Relevant	2		0.3
		Partly Relevant - evidence is available that a limited problem analysis has been undertaken and impact and outcomes may or may not have been based on this	Partly relevant	1		0.15
		Not Relevant - there is no evidence available that an adequate problem analysis has been undertaken	Not relevant	0		0
30%						
Minimum average unweighted score of 4 must be achieved to be able to proceed to assessment of remaining criteria						

Criteria	Sub-criteria (see notes on definitions)	Evidence Required	Rating	Value Rating	Weight %	Adjusted Score
E F F E C T I V E	1. Will the project design enable the achievement of outcome performance targets	Highly Effective - there is strong evidence that inputs are adequate to achieve outputs and that the project is consistent with macro and sector policy context	Highly effective	3	15%	0.45
		Effective - evidence is available that inputs are adequate to achieve outputs and that the project is consistent with macro and sector policy context	Effective	2		0.3
		Partly Effective - limited evidence is available that inputs are adequate to achieve outputs and that the project is consistent with macro and sector policy context	Partly effective	1		0.15
		Not Effective - no evidence is available that inputs are adequate to achieve outputs and that the project is consistent with macro and sector policy context	Not effective	0		0
E N D S	2. Is the project implementation process well enough designed to enable the achievement of outcome performance targets	Highly Effective - there is strong evidence that implementation arrangements are adequate to achieve outputs and fully agreed by stakeholders	Highly effective	3	10%	0.3
		Effective - there is evidence that implementation arrangements are adequate to achieve outputs and agreed by stakeholders	Effective	2		0.2
		Partly Effective - there is limited evidence that implementation arrangements are adequate to achieve outputs and agreed by stakeholders	Partly effective	1		0.1
		Not Effective - there is no evidence that implementation arrangements are adequate to achieve outputs and agreed by stakeholders	Not effective	0		0
25%						

Criteria	Sub-criteria (see notes on definitions)	Evidence Required	Rating	Value Rating	Weight %	Adjusted Score
E F F I C I E N C Y	1. To what extent can it be expected that the project will achieve an EIRR higher than the opportunity cost of capital	Highly Efficient - strong evidence is available that EIRR estimates are sound (i.e. assumptions are reasonable and sensitivity tests are reliable)	Highly efficient	3	10%	0.3
		Efficient - evidence is available that EIRR estimates are sound (i.e. assumptions are reasonable and sensitivity tests are reliable)	Efficient	2		0.2
		Partly Efficient - limited evidence is available that EIRR estimates are sound (i.e. assumptions are reasonable and sensitivity tests are reliable)	Partly efficient	1		0.1
		Not Efficient - no evidence is available that EIRR estimates are sound (i.e. assumptions are reasonable and sensitivity tests are reliable)	Not efficient	0		0
E N D S	2. Will the economic benefits be achieved at least cost	Highly Efficient - strong evidence is available that economic benefits will be achieved at least cost	Highly efficient	3	10%	0.3
		Efficient - evidence is available that economic benefits will be achieved at least cost	Efficient	2		0.2
		Partly Efficient - limited evidence is available that economic benefits will be achieved at least cost	Partly efficient	1		0.1
		Not Efficient - no evidence is available that economic benefits will be achieved at least cost	Not efficient	0		0
20%						

Criteria	Sub-criteria (see notes on definitions)	Evidence Required	Rating	Value Rating	Weight %	Adjusted Score
S U S T A I N A B I L I T Y	1. Is it likely that the human, institutional and natural resources are sufficient to maintain the outcome over the economic lifetime of the project	Highly Likely - strong evidence is available that there will be no demand for the project's resources (capacity will not be exceeded) and that the project's resources will be managed in a sustainable manner (i.e. no significant, net loss of resources)	Highly likely	3	15%	0.45
		Likely - evidence is available that there will be demand for the project's resources (capacity will not be exceeded) and that the project's resources will be managed in a sustainable manner (i.e. no significant, net loss of resources)	Likely	2		0.3
		Partly Likely - limited evidence is available that there will be demand for the project's resources (capacity will not be exceeded) and that the project's resources will be managed in a sustainable manner (i.e. no significant, net loss of resources)	Partly likely	1		0.15
		Not Likely - no evidence is available that there will be demand for the project's resources (capacity will not be exceeded) and that the project's resources will be managed in a sustainable manner (i.e. no significant, net loss of resources)	Not likely	0		0
E N D S	2. If an FIRR has been calculated, is it likely that the estimated FIRR will be achieved	Highly Likely - there is strong evidence that the FIRR will be achieved (i.e. there is no significant, net loss of resources)	Highly likely	3	10%	0.3
		Likely - there is strong evidence that the FIRR will be achieved (i.e. there is no significant, net loss of resources)	Likely	2		0.2
		Partly Likely - there is strong evidence that the FIRR will be achieved (i.e. there is no significant, net loss of resources)	Partly likely	1		0.1
		Not Likely - there is no strong evidence that the FIRR will be achieved (i.e. there is no significant, net loss of resources)	Not likely	0		0
25%						

No.	Kriteria	Sub Kriteria	Value	Weight	Score	Det.
4.	IMPACT	-Dipercepatnya kegiatan dan manfaat karena pembangunan sarana dan prasarana transportasi di era (jalan dan jembatan) untuk meningkatkan perekonomian, tidak memberi dampak negatif secara signifikan terhadap lingkungan namun meningkatkan adanya retribusi bagi masyarakat, terutama ini bisa menggali dana untuk proyek.	3		83	
		-Programan anggaran Proyek akan menghasilkan biaya (274,138), anggaran tsb sebanding dengan nilai fisik (jalan dan jembatan) yg akan dibangun meskipun				
		Total		100	83	Highly relevant

Overall Project Assessment Methodology (Blue Book to Green Book)	
HIGHLY RECOMMENDED	Weighted average 2.5 or more
RECOMMENDED - with suggested revisions	Weighted average between 1.5 and 2.4
CONDITIONALLY RECOMMENDED - obligatory revisions to be made	Weighted average between 0.6 and 1.4
NOT RECOMMENDED	Weighted average is 0.5 or less

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Untuk menjamin keberlangsungan, kesuksesan dan keberhasilan suatu perencanaan dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip Relevansi, Efektifitas, Efisiensi, Sustainable (Keberlanjutan) dan Impact (Dampak) mutlak diperlukan.

Relevansi berkaitan erat dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai bersama-sama dengan pemangku kepentingan. Efektifitas menetapkan kriteria-kriteria tujuan yang hendak dicapai dalam setiap tingkatannya. Efisiensi memilih untuk menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin atau setidaknya sumber daya yang dipergunakan seimbang dengan hasil yang dicapai. Sustainable (Keberlanjutan), kita harus memikirkan keberlanjutan dari seluruh proses perencanaan. Impact (Dampak) harus diperkirakan dampak-dampak yang mungkin timbul dari perencanaan.

Saran

Untuk menjamin tercapainya tujuan dari suatu PPD maka *assessment tools* monev ini sangat baik untuk diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.
- Ardiyos, 2006. *Kamus Standar Akuntansi*. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Ali, Lukman, *et al*, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Anwar, Affandi dan Hadi,Setia,1996. "Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan". *Majalah Prisma*, No. 3, hal 24-28, Februari 1996.
- Bogdan, Robert C., dan Steven J. Taylor, 1992, *Introduction to Qualitative Research Methods : A Phenomenological Approach in the Social Sciences*. Diterjemahkan Arief Furchan, John Wiley dan Sons. Surabaya: Usaha Nasional.
- Blakely, E.J., 1989. *Planning Local Economic Development : Theory and Practice*. California : SAGE Publication, Inc.
- Badudu J.S., dan Zain, Sutan Mohammad. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Demirbas, A., 2009. *Political,Economic and Environmental Impacts of Biofuels: a Review*. UK: Cambridge University Press.
- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014. "Tugas, Fungsi, Visi dan Misi". Melalui <http://www.dpupesdm.jogjapro>

- v.go.id/profil/visi-misi.html
[20/10/2014].
- Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah, 2004. *Pengelolaan Kesenjangan Antar Daerah, Reorientasi Prioritas Perencanaan dan Penganggaran Keadilan Sosial*. Jakarta.
- Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan-Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi*. Jakarta.
- Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan-Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2012. *Keselarasan Kebijakan Energi Nasional Dengan Rencana Umum Energi Nasional Dan Rencan Umum Energi Daerah*. Jakarta.
- Effendi, Lutfi, 2004. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Huntington, Samuel P. dan Joan Nelson., 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Indrajaya, Edy, 2014. "Sustainable Energy for All". Melalui <http://www.iesr.or.id/english/2014/08/workshop-sustainable-energy-central-java-yogyakarta-surroundings/> [30/10/2014].
- Jhingan, M.L., 1999. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartasmita, Ginanjar, 1997. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LPES.
- Kementerian Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia, 2006. *Buku Putih Penelitian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Sumber Energi Baru dan Terbarukan Untuk Mendukung Keamanan Ketersediaan Energi Tahun 2025*. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta : Erlangga.
- Lofland, Jhon, dan Lofland, Lyn H., 1984. *Analyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis*. Belmont: Wads Worth Publishing Company.
- Maskun, H. Sumitro, 1994. "Aspek Perencanaan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah". *Mimeo*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Perencanaan Pengembangan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Bandung, 6-7 Desember 1994. FTSP-ITB.
- Milles, M.B., dan Hubberman, A.M, 1992 *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan Mulyarto, UI Percetakan, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2007. *Motodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant, 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

- Pangeran, Adhamaski, 2014. "Obat Jangka Pendek Bernama Pengendalian BBM Bersubsidi". Melalui [https://www.selasar.com/profil e/MutiaraFitriani](https://www.selasar.com/profil-e/MutiaraFitriani) [25/10/2014].
- Philipus M. Hadjon, 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ridwan, H.R., 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Riyadi dan Bratakusumah, D.S., 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sjafrizal, 2009. *Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*. Padang : Baduose Media.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang Nomor 32 tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*. Jakarta.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi*, Jakarta.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional*. Jakarta.
- Sinamo, Nomensen, 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Solichin, Wahab. A., 2009. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumaryadi. Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama.
- Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustopadidjaja A. R.. 1990. *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta : Haji Masagung.
- Budihardjo, E.**, 2005, *Konflik Tata Ruang dan Pluralisme Budaya dalam Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21*.
- Djumhana, Muhammad.** 2005. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasibuan Malayu, S.P.** 1984. *Manajemen Dasar dan Suatu Pengantar*. Jakarta: Haji Masagung
- Hidayat.** 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Prasetyo Budi Saksono,** 1984.. *Dalam Menuju SDM Berdaya.Bumi Aksara*. Jakarta
- Peter J Green,** 1995, *Reversible jump Markov chain Monte Carlo computation and Bayesian model determination*, Makalah.
- Steven M. Sheffrin,** 2003. *Economics: Principles in action*. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. hlm. 15. ISBN 0-13-063085-3.

Terry G.R. , 1977, *Principle Of Management*, New York: Richard.D. Irwin, Inc.

The Liang Gie, 2001, *Ensiklopedi Administrasi*, PT. Gunung Agung, Jakarta

Tim Prima Pena. 2001. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia Inggris*, Gramedia Press, Jakarta

Ulum, MD Ihyaul, 2008, *Akuntansi Sektor Publik*, UMM Press, Malang.